

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Pemerintah harus mengelola potensi tersebut secara optimal dan lestari. Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong program Perhutanan Sosial sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kelestarian lingkungan (Toha et al., 2023; Aqilla, 2024; Rumaday et al., 2025).

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang masyarakat setempat laksanakan sebagai pelaku utama di kawasan hutan negara maupun hutan hak/hutan adat. Program ini memiliki enam skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Kementerian LHK, 2021). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 3 huruf (d) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berwawasan lingkungan. Pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan dalam pengembangan perhutanan sosial agar mereka turut memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab. Pelibatan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kelestarian kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ilfa et al. (2021) menyatakan bahwa pemerintah merancang program perhutanan sosial sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, mendorong investasi kehutanan, serta mempercepat rehabilitasi dan perbaikan mutu lingkungan.

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Perhutanan Sosial. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Tahun 2023 yang Pusdatin (2024) olah menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Barat, yaitu 16,08%, dengan sekitar 30% penduduk miskin berprofesi sebagai petani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan memerlukan intervensi program pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam rangka itu, KLHK telah menyetujui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk Desa Barumbung, Kecamatan Matakali. Melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.10748/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tanggal 14 September 2023, pemerintah menetapkan areal seluas 389 hektar yang diserahkan kepadanya kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Ujung Karondang



(GoKUPS, 2025). HKm merupakan kawasan hutan yang pemerintah tetapkan dengan tujuan utama memberdayakan masyarakat (Kementerian LHK, 2021). Skema HKm diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mengelola kawasan hutan atau dikenal dengan istilah andil garapan. Kelompok masyarakat dapat mengajukan usulan HKm melalui KTH, Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan Hut), perorangan, maupun koperasi. Pemerintah hanya memberikan persetujuan HKm pada hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang. Setelah memperoleh persetujuan, KTH wajib membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk mengelola dan mengembangkan potensi hasil hutan (Anugrah et al., 2023)

Pemerintah telah memberikan hak akses secara formal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan, namun masyarakat belum tentu berpartisipasi secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program HKm masih berada pada kategori rendah hingga sedang, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan (Rosada et al., 2020; Witno et al., 2020; Lukito et al., 2023). Tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat menentukan keberhasilan program. Masyarakat seharusnya terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi (Imran et al., 2024). Tanjung et al. (2017) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat menentukan efektivitas program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Zulevi et al. (2018) menemukan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dalam perhutanan sosial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan, kondisi rumah, dan lingkungan permukiman masyarakat. Zeilika et al. (2021) menyatakan bahwa partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi petani HKm.

Masyarakat sekitar hutan berperan sebagai pelaku utama yang sering berinteraksi langsung dengan hutan (Tirkaamiana et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang lestari harus melibatkan masyarakat secara aktif (Sanjaya et al., 2017). Konsep partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Winata et al., 2015). Sumaryadi et al. (2005) menjelaskan bahwa partisipasi mencerminkan peran individu atau kelompok dalam proses pembangunan melalui kontribusi pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun materi, serta melalui pemanfaatan hasil pembangunan. Nasdian (dalam Rosyida, 2011) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif yang warga komunitas inisiasi dan kendalikan sendiri melalui lembaga dan mekanisme yang mereka gunakan secara efektif.



Convers (1991) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tiga dalam pembangunan. Pertama, partisipasi menjadi alat untuk informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat gram pembangunan tidak mengalami kegagalan. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program karena t dalam proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, partisipasi

merupakan hak demokratis masyarakat dalam pembangunan wilayahnya sendiri.

Peneliti dapat mengukur tingkat partisipasi masyarakat melalui pendekatan tangga partisipasi Arnstein. Beberapa penelitian telah menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat (Dewi et al., 2019; Indriani et al., 2021; Arbayah et al., 2022). Selain itu, peneliti perlu merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan Force Field Analysis (FFA) dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam proses partisipasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan pendekatan FFA dalam perumusan strategi (Sabar et al., 2011; Nurhikmah et al., 2018).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini perlu mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Desa Barumbung di Kabupaten Polewali Mandar menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian ini karena desa tersebut telah memperoleh izin pengelolaan HKm, namun efektivitas dan keberlanjutan partisipasi masyarakatnya masih memerlukan evaluasi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.



- Merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

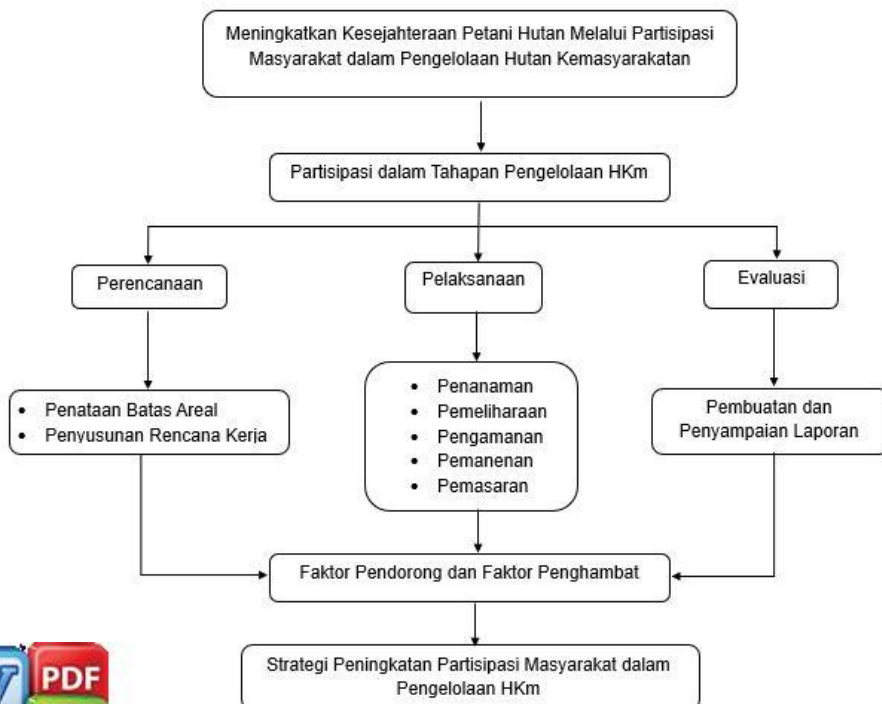
1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi ilmu pengetahuan diharapkan menjadi bahan referensi ataupun rujukan bagi peneliti dalam penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- Terhadap pemerintah diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah beserta pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat.

1.5 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian menjadi landasan berpikir untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Mengacu pada konsep-konsep dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirancang dengan kerangka konseptual sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



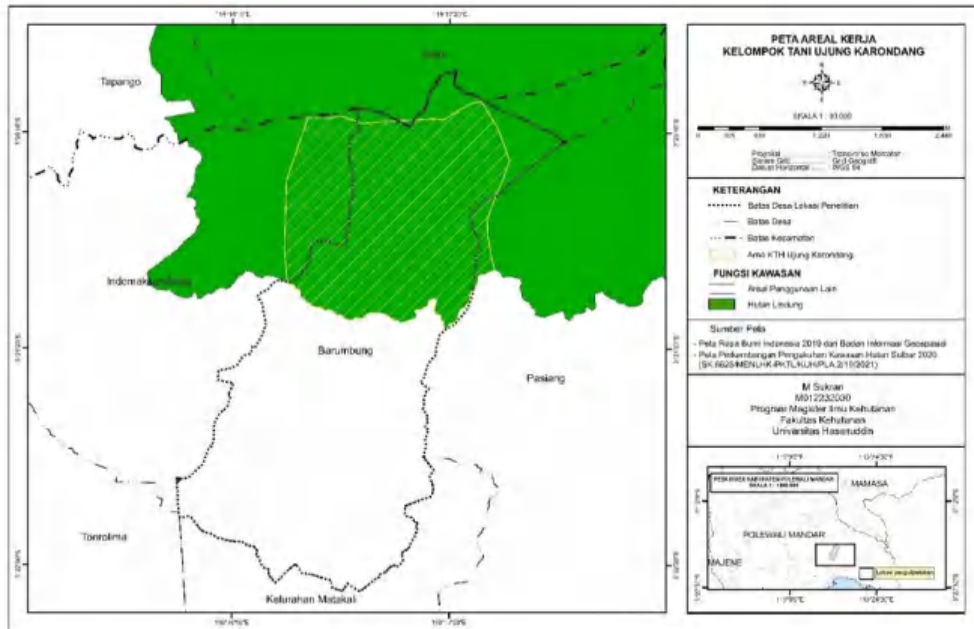
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



BAB II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2025 di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan sebagai Lokasi program perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Desa Barumbung terletak di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. terletak kurang lebih antara $119^{\circ} 15' 52,53''$ Bujur Timur - $119^{\circ} 17' 56,66''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 22' 2,414''$ Lintang Selatan - $3^{\circ} 20' 13,016''$ Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Desa Barumbung memiliki batas sebagai berikut (Monografi Desa Barumbung, 2022);

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kecamatan Tapango |
| Sebelah Selatan | : Desa Tonrolima dan Kelurahan Matakali |
| Sebelah Barat | : Desa Indu Makkombong |
| Sebelah Timur | : Desa Pasiang |



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Desa Barumbung ± 880,95 hektar, Terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni Dusun Katumbangan dan Dusun Nene Bece. Tutupan lahan lahan kering campuran dan sawah merupakan area paling luas, untuk pertanian lahan kering campuran dan ± 263,67 hektar besar pekerjaan masyarakat Desa Barumbung adalah bertani, tanaman berupa kakao, padi, aren, cengkeh serta aneka buah-

buah seperti durian, langsung, rambutan, alpukat dan kelapa. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Barumbung mengalami musim hujan dan musim kemarau setiap tahunnya

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Alat Penelitian

| No. | Alat | Kegunaan |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. | Komputer/ Laptop | Pengolahan data |
| 2. | Kamera | Dokumentasi Penelitian |
| 3. | Alat Tulis Menulis | Catatan proses penelitian |
| 4. | <i>Receiver Global Positioning System</i> (GPS) | Mengambil titik lokasi penelitian |

Tabel 2. Bahan Penelitian

| No. | Alat | Kegunaan |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Peta Hutan Kemasyarakatan Desa Barumbung | Lokasi Pengambilan Data |
| 2. | Kuisisioner | Mendapatkan informasi dari responden |

2.3 Metode Pengambilan Data Penelitian

2.3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota KTH yang terlibat dalam pengelolaan HKm dan terdaftar sesuai Surat Keputusan Persetujuan Perhutanan Sosial nomor SK.10748/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tanggal 29 September 2023 dan mempertimbangkan hasil observasi lapangan yakni dengan jumlah anggota 62 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus atau mengambil seluruh anggota KTH. Penentuan jumlah sampel tersebut berdasarkan pendapat Arikunto (1997) yang menyatakan apabila jumlah subjek (populasi) kurang dari 100 (seratus) maka lebih baik semua anggota populasi dijadikan sampel, namun jika subjeknya lebih besar dari 100 (seratus) sampel dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari total populasi. Dengan demikian sampel penelitian adalah sebanyak 62 orang



Sumber Data

dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan

menggunakan kuisisioner dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sementara, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan data-data dari instansi terkait yang berkaitan dengan tema penelitian.

2.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. **Observasi Lapangan**
Observasi lapangan merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan HKm.
2. **Wawancara**
Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada responden, yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak ditemukan dalam kegiatan observasi. Menurut Moleong (2008) wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan informasi dari responden secara langsung yaitu tatap muka dengan menggunakan kuisisioner atau tidak. Peneliti melakukan wawancara terstruktur secara tatap muka dengan bantuan kuisisioner mengenai topik terkait informan. Informasi yang digali terkait bentuk partisipasi masyarakat pada pengelolaan HKm yang dilakukan oleh KTH di Desa Barumbung dan faktor pendorong serta faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm.
3. **Focus Group Discussion (FGD)**
FGD merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman peserta terkait suatu topik tertentu. FGD kelompok dilakukan untuk mengeksplorasi isu khusus dalam pengelolaan HKm, dalam hal ini faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Dari kegiatan FGD akan diperoleh informasi dari suatu interaksi informan berdasarkan hasil diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama.
4. **Studi Literatur**
Studi literatur merupakan pendekatan penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis (literatur) untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian.

2.4 Metode Analisis Data Penelitian

2.4.1. Menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan HKm



Tingkat partisipasi masyarakat diketahui dengan melakukan wawancara menanyakan hal-hal yang terkait dengan kriteria partisipasi. digunakan pendekatan Tangga Partisipasi Arnstein yang digunakan lam memahami tahapan partisipasi masyarakat dan skala likert untuk menilai persepsi responden terhadap setiap indikator penilaian persepsi responden tersaji pada Tabel 3.


Tabel 3. Kriteria Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan HKm

| No | Keterangan | Skor |
|----|---------------------|------|
| 1 | Sangat Setuju | 5 |
| 2 | Setuju | 4 |
| 3 | Netral | 3 |
| 4 | Tidak Setuju | 2 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 1 |

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan mengintegrasikan Tipologi Arnstein yang bersifat kualitatif dan Skala Likert yang bersifat kuantitatif untuk menghasilkan data yang terukur serta dapat dibandingkan antar tahapan pengelolaan HKm. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

Arnstein (1996) menyatakan bahwa "*Citizen Participation is Citizen Power*", yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merefleksikan distribusi kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah. Arnstein mengembangkan konsep tersebut dalam bentuk tangga partisipasi yang terdiri atas delapan tingkat dan terbagi ke dalam tiga kategori. Tingkatan partisipasi dari yang terendah hingga tertinggi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat

| Tangga/Tingkatan Partisipasi | Hakekat Kesertaan | Tingkat Pembagian Kekuasaan/derajat partisipasi |
|--|---|--|
| Manipulasi Terapi | Partisipasi hanya formalitas Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi | Bukan partisipasi (<i>non-participation</i>) |
| Pemberitahuan | Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi | Partisipasi semu (<i>Tokenism</i>) |
| Konsultasi | Masyarakat disengar, tapi tidak selalu dipakai saranya | |
| Penentraman | Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan | |
| Kemitraan Pendelegasian | Timbal balik dinegosiasikan Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) | Tingkat kekuasaan ada di masyarakat (<i>citizen power</i>) |
|  at | Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat | |

Penelitian ini mengukur tingkat partisipasi masyarakat pada tiga tahapan pengelolaan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi (Roslinda et al., 2022). Tingkat partisipasi kemudian dikategorikan ke dalam tiga derajat berdasarkan delapan tangga partisipasi Arnstein, yakni *non-participation*, *tokenism*, dan *citizen power*. Pengukuran dilakukan melalui sistem skoring pada tiga variabel (tahapan pengelolaan) yang mencakup delapan kriteria dan 64 pernyataan kuesioner. Tahap perencanaan terdiri atas penataan batas areal kerja dan penyusunan rencana kerja; tahap pelaksanaan meliputi penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran; sedangkan tahap evaluasi mencakup penyusunan dan penyampaian laporan. Setiap kriteria dioperasionisasikan ke dalam delapan pernyataan, sehingga total terdapat 64 pernyataan (8 × 8), yang seluruhnya dinilai menggunakan skala Likert lima poin, sehingga interval skor dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Ajjah et al., 2022);

$$\text{Interval Skor} = (\text{Nilai skor maksimum} - \text{Nilai skor minimum}) / \text{Jumlah kategori}$$

Tabel 5. Variabel, Kriteria dan Indikator pencapaian kategori partisipasi

| Variabel | Kriteria | Indikator |
|-------------|-----------------------------------|--|
| Perencanaan | Penataan Batas Areal Kerja | Setiap kriteria terdiri atas delapan pernyataan berskala 1–5, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga derajat partisipasi berdasarkan rentang skor yang ditetapkan. |
| | Penyusunan Rencana Kerja | |
| Pelaksanaan | Penanaman | Tahap Perencanaan: 1. <i>Non-participation</i> : 16-37 2. <i>Tokenism</i> : 38-59 3. <i>Citizen Power</i> : 60-80 Tahap Pelaksanaan: 1. <i>Non-participation</i> : 40-93 2. <i>Tokenism</i> : 94-147 3. <i>Citizen Power</i> : 148-200 Tahap Evaluasi: 1. <i>Non-participation</i> : 8-18 2. <i>Tokenism</i> : 19-29 3. <i>Citizen Power</i> : 30-40 |
| | Pemeliharaan | |
| | Pengamanan | |
| | Pemanenan | |
| | Pemasaran | |
| Evaluasi | Pembuatan dan Penyampaian Laporan | |

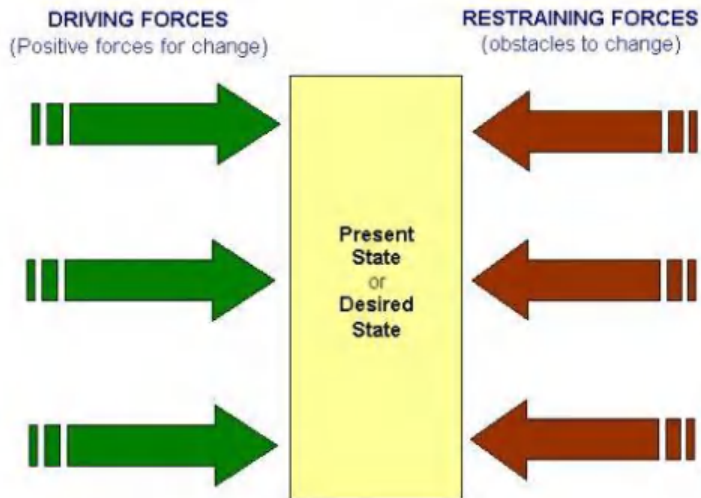
Berdasarkan skor total dari 64 pernyataan pada kuisisioner tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan dikategorikan berdasarkan skor sebagai berikut:



64-149
 35
 36-320

2.4.2. Menganalisis Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat serta Merumuskan Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan HKm.

Peneliti melakukan inventarisasi faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm setelah memperoleh data tingkat partisipasi Masyarakat. Olah data dilakukan dengan pendekatan *Force Field Analysis* (FFA). FFA dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menguraikan tindakan-tindakan yang strategis dalam mengambil keputusan. Melalui FFA semua faktor pendorong dan faktor penghambat suatu keputusan dapat dilihat. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. *Force Field Analysis*

Inventarisasi semua faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, yang tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan HKm

| Variabel | Kriteria | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| Perencanaan | Penataan Batas Areal Kerja | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |
| | Penyusunan Rencana Kerja | Dst | Dst |



Lanjutan Tabel 6.

| Variabel | Kriteria | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| Pelaksanaan | Penanaman | 1. | 1. |
| | Pemeliharaan | 2. | 2. |
| | Pengamanan | 3. | 3. |
| | Pemanenan | Dst | Dst |
| | Pemasaran | | |
| Evaluasi | Pembuatan dan | 1. | 1. |
| | Penyampaian | 2. | 2. |
| | Laporan | 3. | 3. |
| | | Dst | Dst |

Berdasarkan tabel diatas, dituliskan faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm. Kemudian melakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam upaya mencapai tujuan, melalui FGD dan menggunakan skala likert 1-5 untuk menilai seberapa kuat pengaruh masing-masing faktor.

Tabel 7. Kriteria penilaian faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan HKm menggunakan skala likert

| No | Keterangan | Skor |
|----|--------------|------|
| 1 | Sangat Kuat | 5 |
| 2 | Kuat | 4 |
| 3 | Sedang | 3 |
| 4 | Lemah | 2 |
| 5 | Sangat Lemah | 1 |

Peneliti mendiskusikan faktor pendorong dan faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam setiap variabel, kemudian disusun cara untuk memperkuat faktor pendorong dan memperlemah faktor penghambat. Setelah strategi atau cara tersebut diperoleh, selanjutnya dirumuskan rencana aksi yang dapat dilakukan secara nyata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Barumbung Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.

